



Kepemimpinan Politik Menurut Raja Ali Haji

Gilang Fazira

Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Email: gilangfazira@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Raja Ali Haji tentang kepemimpinan politik. Maraknya pemimpin tidak bermoral belakangan ini, bahkan korup, serta egois menjadi suatu hal yang perlu dibenahi bersama. Hal ini semacam peringatan bagi kita untuk memilih pemimpin yang tepat dan sesuai dengan kriteria kepemimpinan ideal agar menciptakan masyarakat yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan ajaran Islam. Sebagai seorang ulama, pemikir dan negarawan, Raja Ali Haji memiliki konsepsi kepemimpinan politik yang berakar dari tradisi Islam dan budaya Melayu, yang dalam beberapa hal masih relevan dengan kondisi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Jenis penelitian ini adalah library research dengan kitab primer Tsamarat al-Muhimmah karya Raja Ali Haji serta referensi sekunder berupa buku-buku jurnal, artikel serta karya ilmiah yang berkorelasi dengan kepemimpinan. Teknik penulisan Skripsi ini merujuk kepada SK Rektor nomor 507 buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jakarta 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memilih seorang pemimpin adalah “orang yang dituakan” oleh masyarakatnya, karena pemimpin tersebut akan mengayomi (masyarakat), moral yang tinggi, menjaga dari mara bahaya, melindungi, dan menuntun masyarakat dalam kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Pemimpin seperti itu, memiliki ilmu pengetahuan dan memegang teguh ajaran Islam. Kriteria pemimpin seperti ini yang sekiranya dapat menghidupkan kesejahteraan, baik secara lahiriah pun batiniah.

Kata Kunci: Kepemimpinan; Pemimpin; Politik; Raja Ali Haji

Abstract:

This study aims to analyze Raja Ali Haji's views on political leadership. The recent rise in immoral, corrupt, and selfish leaders highlights the urgent need for reform. This serves as a reminder for us to choose leaders who meet the criteria of ideal leadership, in order to create a happy and prosperous society in line with the values and goals of Islamic teachings. As a scholar, thinker, and statesman, Raja Ali Haji developed a concept of political leadership rooted in Islamic tradition and Malay culture, which remains relevant in certain aspects to the current context. This research uses a descriptive-analytical method. It is a library research based on Raja Ali Haji's primary work Tsamarat al-Muhimmah,

supported by secondary sources such as books, journals, articles, and other scholarly works related to leadership. The thesis writing technique follows the Rector's Decree No. 507 and the 2017 UIN Jakarta Guidelines for Scientific Writing. This study shows that a leader should be someone respected by the community, as such a leader would nurture the people, possess high moral standards, protect them from harm, provide guidance, and lead them in both worldly and spiritual matters. Such a leader is knowledgeable and firmly upholds Islamic teachings. Leaders with these qualities are believed to be capable of fostering both physical and spiritual well-being.

Keywords: Leadership, Leader, Politics, Raja Ali Haji

Pendahuluan

Satu dekade pasca reformasi berlalu, tata kelola pemerintah Indonesia masih tidak beraturan dikarenakan secuil kerakusan penguasa yang tamak dan menjauhkan dari kemakmuran masyarakat *bad governance*. Hilangnya moral pemimpin, koruptor yang merajalela, mengakibatkan melemahnya penegakan hukum, menyebabkan busuknya kultur birokrasi, rusaknya perilaku masyarakat. Ironisnya, tokoh agama dan aktivis kampus menjelma serta memakai topeng dalam berpolitik, ikut-ikutan, dan mengaburkan kehendak moral masyarakat.

Peran pemimpin begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejatinya manusia membutuhkan pemimpin, untuk mewujudkan tujuan bersama dalam komunitas besar yang bernama negara. Aristoteles menyebut manusia sebagai “*Zoon Politicon*” atau “*political community*”¹, yakni makhluk sosial yang hidup berkomunitas. Manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat. Kelemahan manusia adalah tidak memiliki kemampuan bertahan hidup sendiri.

Menurut Raja Ali Haji yang bertolak dari budaya Melayu menjadikan seorang pemimpin sebaiknya ialah “*orang yang dituakan*” oleh masyarakatnya. Karena pemimpin yang tersebut akan mengayomi (masyarakat), memiliki moral yang tinggi, menjaga dari mara bahaya, melindungi, dan menuntun masyarakat dalam kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Kriteria pemimpin seperti ini yang sekiranya dapat menghidupkan kesejahteraan masyarakat baik secara *lahiriyah* pun *batiniyah*.²

Layaknya al-Ghazali, Raja Ali Haji membangun konsepsi kepemimpinan berbasis akhlak, moral, spiritual agama. Setiap umat muslim berpacu dalam berkemasyarakatan sosial. Degradasi kemanusiaan serta keruntuhan masyarakat bukan hanya disebabkan oleh pemikiran pemimpinnya, tapi karena runtuhnya moral spiritual tersebut. Karena inilah, seorang pemimpin, selain berpengetahuan

¹ Aristoteles, *Politic*, terj. Benjamin Jowett, (Kitchener, Batoche Books, 1999), Book 1, Part 1.

² Tenas Effendi, “*Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu Riau*”, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. 2006), h. 65.

luas dalam tata pemerintahan dan ketatanegaraan, harus juga mempunyai moralitas yang tinggi.

Jika merujuk kepada karya al-Mawardi, kewajiban mengangkat kepala negara (imam), sekurang-kurangnya memiliki tujuh syarat: 1) Keseimbangan (*al-adalah*) yang memenuhi semua kriteria, 2) berilmu pengetahuan dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum, 3) sehat mata, pendengarannya dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan bertanggung jawab, 4) sehat badan, agar melangkah cepat dalam pergerakan, 5) pandai mengendalikan urusan rakyat dalam kemaslahatan umum. 6) berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh. 7) Keturunan Quraisy.³ Senada dengan al-Mawardi, Raja Ali Haji mengafirmasi bahwa pemimpin harus bermoral yang tinggi, *tawadhu*, berani serta seimbang dalam menuntun masyarakat dalam menyikapi urusan duniawi maupun *ukhrawi*.

Dari penjelasan di atas penulis bertolak mengenai pentingnya pemimpin. Hal ini sudah dibukukan oleh Raja Ali Haji. Khususnya dalam bukunya itu yang bisa menjadi rujukan dalam perbaikan bagi negara Indonesia sekaligus sebagai catatan refleksi kepada pemimpin yang menjabat di negeri Indonesia ini. Jika prinsip ini konsisten dilaksanakan, maka masyarakat adil, makmur, tenteram, di Indonesia akan terlaksanakan serta menjadi bangsa yang berbudi dan disegani ketika bangsa lain melirik. Sekiranya nasihat-nasihat berlian dari Raja Ali Haji ini, mengembalikan lagi kodrat pemimpin itu. Seperti mengayomi, melindungi, memerhatikan, pemimpin yang merasa senasib pada rakyatnya, jangan sampai pemimpin senang tetapi rakyat menderita.

Konsep Kepemimpinan Politik

Dalam pandangan kepemimpinan politiknya Raja Ali Haji menyebut bahwa pengabaian syariah dan pengekan nafsu ada konsekuensinya. Diibaratkan dengan api dalam diri manusia. Semakin lama semakin menyala, semakin sulit dipadamkan, lalu membesar menjadi kobaran kemarahan yang membahayakan eksistensi kerajaan. Dalam karya-karya lain, api kedengkian ini diwujudkan dalam berbagai peristiwa fitnah (propaganda, gosip, menjelek-jelekan orang lain). Berulang kali fitnah dijadikan kambing hitam dalam konflik antar Melayu dan Bugis. Oleh karena itu, Riau yang terpecah dianalogikan sebagai perahu dengan dua kapten atau sebuah negeri dengan dua raja. Fitnah yang didasari kelemahan manusia dapat menimbulkan kerugian yang tidak terduga. Namun Riau beruntung dipimpin oleh orang-orang berilmu, yang menganggap perolehan ilmu dan akal adalah anugerah dari Allah. Berkat kearifan mereka, perdamaian kembali pulih dengan ditegakkannya sumpah setia antara Bugis dan Melayu dalam rangka untuk meredam bantahan dan fitnah.⁴

³ Abdul Hayyie al-Kattani & Kamaluddin Nuridin, "*Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), edisi. I, cet ke-1, h. 18.

⁴ Muhammad Faisal, *Etika Melayu: Pemikiran Moral Raja Ali Haji*, (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), h. 124-125

Topik kepemimpinan ialah topik menarik untuk dikaji. Isu kepemimpinan menjadi perhatian setiap zaman dan generasi demi generasi guna menemukan rumusan sistem kepemimpinan yang praktis dan sesuai dengan zamannya masing-masing. Pemimpin memiliki peran strategis dalam organisasi karena keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh etika pemimpin.

Kepemimpinan berasal dari kata “pemimpin”, dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (*leadership*) berarti kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain agar bertindak untuk mencapai tujuan bersama, sehingga menjadi awal dan pusat dari struktur dan proses kelompok.⁵ Kata “Pemimpin” sendiri muncul pada tahun 1300, kata “kepemimpinan” tahun 1800 (selisih 500 tahun).⁶ Definisi pemimpin serta kepemimpinan begitu beragam.

Dalam ajaran Islam, pemimpin dituntut mampu menampilkan kepribadian yang akhlaqul karomah (memiliki moralitas yang baik), *Qona'ah* (sederhana), dan Istiqomah (konsisten). Suri teladan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah:

- a. Siddiq artinya jujur, benar, berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan.
- b. Tabligh artinya senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif.
- c. Amanah artinya dapat dipercaya memiliki legitimasi dan akuntabel.
- d. Fathonah artinya cerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan profesional.

Prinsip-prinsip pemimpin juga dikemukakan oleh Ibn Taimiyah, tiga prinsip tersebut ialah 1) Amanah, 2) keadilan (adalah), 3) Musyawarah (syura).⁷

Kepemimpinan Politik Menurut Raja Ali Haji

Fakta bahwa Raja Ali Haji terlahir dari keluarga bangsawan Bugis, karena kecenderungan cinta pada ilmu pengetahuan terkhususnya agama. Pulau Penyengat mendapati daya tarik ulama luar dalam melakukan ekspedisi, untuk mengajarkan berbagai ilmu agama. Karya-karya keagamaan baik dari Timur Tengah maupun ulama-ulama luar dari Pasai, Pattani, dan Aceh, Riau juga masuk. Kosmopolitanisme pulau inilah secara tidak langsung membentuk dasar keagamaan dan kematangan ilmunya, sejak muda sudah bergulat dengan intelektual, juga latar kebangsawanan Riau ini jadi nilai tambahan beliau⁸

⁵ Ishak Runi, *Buku Ajar: Teori Kepemimpinan*, (Polopo: Pusat Pengembangan Materi Ajar (PPMA), 2016), h. 5.

⁶ W. Pangestoety, *Kepemimpinan*, (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2016), h. 1.

⁷ Ahmad Khairul Fata, *Kepemimpinan dalam Politik Islam*, *Jurnal Review*, Vol. 2 No.1. (2012), h. 8.

⁸ Hasan Junus, *Raja Ali Haji, Budayawan di Gerbang Abad XX*, (Pekanbaru: Unri Press, 2002), h. 63-64.

Kepemimpinan politik menurut Raja Ali Haji dalam *Tsamarat al-Muhimmah* ialah bagaimana hal ihwal pelaksanaan kekuasaan tersebut. Dalam *Tsamarat al-Muhimmah* menyebut bahwa kekuasaan adalah “raja” (orang) atau “kerajaan” (institusi), yang bahwa penguasa institusi negara adalah “raja” (*mulk*), maka Raja Ali Haji membayangkan negara dalam teori politik Barat disebut Monarki. Dalam konteks fikih politik Raja Ali Haji mendirikan “raja” hukumnya *fardu kifayah* dan tanggung jawab bersama.⁹ Mirip dengan pendapat al-Ghazali pada *al-I'tiqad fi al-Iqtisad*, dan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al Sultaniyyah wa-Alwilayah al-Diniyyah*. Kewajiban dalam menentukan ini, layaknya menuntut ilmu pengetahuan, mengajar atau menjadi hakim.

Seperti beberapa ilmuwan Islam klasik al-Mawardi dan al-Ghazali jika membahas tentang pemimpin, Raja Ali Haji menatanya dengan menggunakan logika dan menulisnya sendiri. Bahkan, al-Ghazali dalam *al-I'tiqad fi al-Iqtisad* mengatakan bahwa *imamah* merupakan pondasi utama dalam pengelolaan agama serta dunia dalam meraih dunia akhirat.¹⁰

Namun, penggunaan “raja” ternyata belum menjelaskan segalanya. Kuat kesan bahwa istilah “raja” digunakan Raja Ali Haji sebagai istilah netral. Maksudnya, Raja Ali Haji tidak memihak pada kerajaan sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan dari bentuk pemerintahan lain seperti khalifah dan kesultanan. “Raja” yang dibayangkan ialah pemimpin politik dalam suatu entitas masyarakat yang secara demografis dan geografis tinggal di wilayah tertentu.

Raja Ali Haji membahas implikasi seseorang untuk menjadi raja dan hukum penetapan Raja. Yakni, *bay'ah* (perjanjian oleh lembaga politik yang disebut *ah-hall wa al-aqd* yakni sebab dilantik. Sebuah lembaga politik yang memiliki wewenang melantik setelah sebelumnya menggelar musyawarah untuk mufakat. Komposisi *ahl al- hali wa al- 'aqd* terdiri dan beberapa orang laki-laki adil dan memiliki reputasi baik kepada kepala suku, dan para ulama yang dianggap layak dan mumpuni.

Menurut pendirian sebuah “raja” dan “kerajaan secara hukum dianggap sah, juga lazim menurut pandangan adat, jika ditempuh melalui salah satu dari tiga cara di atas. Karena menurut Raja Ali Haji jika melawan raja berarti memberontak (*bughat*). Begitu juga Raja Ali Haji tidak membahas secara terperinci tentang cara ketiga *taghalub*, dalam memperoleh kekuasaan. Tidak begitu spesifik dalam membahas pemerintahan militer. Juga sebab pertama yakni *bay'ah* dan *istikhalaf* menjadi raja, Raja Ali Haji hanya membutuhkan masing-masing dua dan satu paragraf. *Bay'ah* ditempatkan pada posisi pertama, serta tujuannya ialah sebagai dukungan politik rakyat kepada pemimpin agar kepemimpinan berjalan efektif dan mengikat semua. Sedangkan *istikhalaf* ialah mekanisme yang ditempuh seorang menjadi raja karena ditunjuk menjadi penguasa yang akan berkuasa menjadi penggantinya.

⁹ Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 243

¹⁰ Achmad, *Pemikiran Politik...*, h. 243-245

Selama hidupnya Raja Ali Haji berada dalam sistem politik monarki, yang secara politik ia berada pada wilayah kerajaan Riau dan Lingga. Hanya dua dari tiga konsep Raja Ali Haji yang agak realistik dijalankan. Konsep *bay'ah* oleh *ahl-ikhtiar* hanya berjalan pada zaman khulafa' al-rasyidin. Dalam suasana politik normal, aula ulama, bukan masjid, menurut Raja Ali Haji ialah tempat dipilih untuk acara pelantikan Raja oleh *ahl al-ikhtiyar* atau *ahl al-hall wa al-aqd*. Raja Ali Haji juga mengingatkan untuk menyiapkan naskah pelantikan tertulis, tidak saja bagi raja tetapi juga bagi para pembesar kerajaan, seperti *wazir*, *qadi al-quddat*, *qadi*, dan menulis naskah penerimaan (*qabul*) dari para pejabat kerajaan tersebut.¹¹

Pada bab 3, bab ini menyinggung tentang hal-hal yang tidak boleh atau tidak harus dilestarikan oleh pemimpin dan para pembesar kepemimpinan, tiga hal tersebut di antaranya: pertama, memelihara ruh (nyawa), kedua memelihara jasad, ketiga memelihara nama. Yang paling terpenting dari ketiga ini ialah menjaga ruh (kehidupan).

Menurut Raja Ali Haji, hendaknya orang sekelas ulama yang bertakwa, berakhlak baik, terbiasa bersabar, ridha akan *qada*. Allah ta'ala dan tawakal terhadap apa yang dijanjikan Tuhan seperti rezeki, dan lain- lain. Jangan menyikapi cobaan dengan hal yang justru membuat sedih dan susah karena itu tidak diwajibkan oleh syariat. Hendaknya dibalas dengan kesabaran, ridla, tawakal, doa, dan doa. Apabila Allah SWT berkenan menolong hamba- Nya yang sedang kesusahan hendaknya segera bersyukur, bila ternyata Allah lambat dalam menolong hendaknya bersabar dan berbaik sangka kepada-Nya. Kesabaran itu hendaknya dilakukan mengingat manusia tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Jangan mengeluh kesah ke sana kemari, lebih baik jaga arwah untuk memperjelas masalah di atas dapat dikaji dalam kitab- kitab karya para sufi seperti kebanyakan kitab karya al- Ghazali.¹²

Pada pasal 2, Merawat Tubuh dan Menjaga Kesehatan, Raja dan para pejabat kerajaan diharapkan menjaga badan karena penyakitnya akan mengganggu pekerjaan. Agar tubuh tetap sehat ada lima hal: makan dan minum, tidur, *jima'* (berhubungan seks), olahraga, dan bernafas. Makan dan minum harus teratur dan beradab. Makanlah ketika lapar dan minumlah ketika haus. Jangan makan sepuasnya. Jangan menelan makanan yang belum diolah, apalagi setelah minum susu dan ikan. Jangan makan makanan basi. Konsumsilah makanan yang sesuai dengan kebiasaan tubuh dan kebiasaan alam. Perilaku manusia terdiri dari empat unsur: panas kering, panas basah, sejuk kering, dan sejuk basah. Langit juga memiliki empat garis melingkar. Sirkulasi panas kering dan panas basah, sejuk kering dingin kering dan sejuk basah. Tabi'at rempah- rempah demikian juga adanya

¹¹ Achmad, *Pemikiran Politik*, h. 254-255

¹² Raja Ali Haji, "Tsamarat Al - Muhimmah" (Lingga: Office Government, 1886), h. 65-72.

Tabi'at badan yang memiliki sifat tidak tersembunyi seperti ruh, jiwa, dan akal tidak asing bagi ahli nabati. Khasiat makanan dan rempah-rempah juga tidak tersembunyi bagi para tabib. Garis edar tata surya seperti bintang, bulan planet-planet berikut pergerakannya tidak asing bagi ahli *falakiah* (Bintang). Untuk kasus terakhir ini pergerakannya mengakibatkan perubahan tabiat hawa di dunia ini. Dengan demikian ilmu *tafsi* dikembalikan kepada ahlinya.

Sudah selayaknya raja dan para pembesar mengetahui ilmu ini agar dapat membedakan kebiasaan tubuh, makanan, rempah-rempah, dan sebagainya. Dengan demikian, tubuh bisa mengonsumsi makanan sesuai kebiasaannya sendiri agar tetap sehat. Hendaknya ia makan dan minum dengan sopan santun, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *al-Adab al-Akl dalam Ihya' 'Ulam al-Din*.¹³

Pada pasal 3, Memelihara Nama Baik, Raja dan para pangeran kerajaan tidak boleh menyimpan nama buruk demi disebut sebagai orang baik. Julukan buruk bagi raja dan pejabat pemerintahan adalah nama-nama seperti zalim (tiran), bodoh, lalai, dan penakut.

Zalim adalah sekeji-keji nama bagi raja dan bagi para pembesar kerajaan. Secara bahasa, zalim, berarti “kelam”, berasal dari kata *zalim-yazlimu - zilman fahuwa zalimun (isim fa'il)* yakni dalam konteks syara' - “kelam dalam membedakan antara yang haq dan yang batil”. Zalim dalam pengertian “aniaya” berarti “memperlakukan seseorang tidak dengan seharusnya”. Misalnya mengeluarkan putusan hukum dan perlakuan yang melanggar hukum Al-Qur'an, hadis dan konsensus terhadap nyawa, badan, harta benda, dan kemaluan orang.

Lawan zalim adalah 'adil'. Artinya, menghukum atau memaksakan sesuatu kepada manusia sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, hadis dan ijma'. Atau melakukan sesuatu yang relatif mudah, patut dan bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang benar dan pada orang yang memiliki mata hati.¹⁴

Di akhir Bab *Tsamarat al-Muhimmah* Raja Ali Haji memaparkan Barang yang Cacat dan Cedera bagi Raja dan Para Pembesar Kerajaan. Di antara sifat-sifat kecelaan, baik dalam hati maupun luar ruh, yang berpotensi mendatangkan kerugian besar bagi diri sendiri dan pihak lain akan dijelaskan di bawah ini.

Pertama, takabur. Artinya, membesarkan diri sendiri tanpa disahkan syara'. Yang dimaksud dengan membesarkan diri di sini adalah “memandang seorang makhluk dengan tilik yang kurang dari padanya. Keduanya *ghadab*. Yang dimaksud dengan *ghadab* adalah marah yang merupakan salah satu cela bagi hati. Ketiga *hasud*. Yang dimaksud dengan *hasad* adalah dengki yang merupakan salah satu sifat cela yang besar bagi hati. Keempat, *tama'*. Yakni sikap loba untuk meraih segala sesuatu hanya mengikuti hawa nafsu yang melampaui *hadd syara'*.

¹³ Raja Ali Haji, *Tsamarat al-Muhimmah*, h. 72-76

¹⁴ Raja Ali Haji, *Tsamarat al-Muhimmah*, h. 76-78.

Kelima, bakhil atau kikir. Sifat ini juga dapat merusak reputasi seseorang, terutama raja dan pejabat pemerintah.

Keenam, *mughaffal* (mengabaikan) yaitu lalai atau lengah dalam mentadbirkan kerajaan. Ketujuh, *israf* (berlebih-lebihan). Kedelapan, *al-mazah* (bergurau) dan *mustahzi*, yakni bergurau dan bersenda melampaui batas yang ditetapkan syara'. Kesembilan, hendaknya para raja dan pejabat kerajaan menjaga lidahnya dari *al-kazib* (berbohong), *al-mukhalif al-wad'i* (mendingkari janji) dan *kalam al-fahisty* (perkataan tercela). Kesepuluh, *al-jazā* (perhatian) atau berkeluh kesah ketika mendapat *bala'* (kesusahan). Raja dan para pembesar kerajaan harus menghindari sifat ini, dan tetap menatap tajam ke dalam hati terhadap *bala'* dan kesusahan itu. Kesebelas *'ajalah* (buru-buru) yakni tergesa-gesa pada pekerjaan yang semestinya bisa diperlahankan.

Kedua belas, *taswif*. Yakni mengulur-ulur pekerjaan yang tidak masuk akal dan adat kebiasaan. *Taswif* disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, lalai, malas, bodoh, cuek dan kurang takut kepada Allah SWT. Ketiga belas, tidak memberikan penghargaan kepada orang yang baik dan memberi jasa padanya. Keempat belas, kurang menghiraukan dan meremehkan agama.¹⁵

Menurut sebagian ahli hukum (*hukama'*), ada tiga jenis makna raja. Pertama, raja agama, yang perintah dan larangannya diikuti oleh masyarakat, sesuai dengan hukum syariah. Kedua, raja yang menjaga dirinya dari segala sesuatu yang haram, agar mengikuti syara' dan *muru'ah*. Raja memegang kekuasaan *qalam* dan pedang. Jika dia berpaling dari *syatar* (berbalik) *qalam* (tulisan) dan tergelincir langkahnya, maka luruskan dengan *hadd* yang berlaku. Tiga raja *huwiy* (jatuh) yaitu raja seperti yang dibahas pada bab pertama bab kedua kitab ini - yang anggapan salah kaprahnya adalah makna kerajaan karena bertindak sesuka hatinya. Raja ini mengatur dan memperlakukan rakyat sesuka hatinya. Ia memerintah mengikuti hawa nafsunya tanpa mengenal halal haram, dosa pahala dan sah batal. Akhirnya ia memenuhi perutnya dengan makanan yang lezat menutup akal cerdasnya dengan sibuk memenuhi syahwatnya dengan perempuan, dan tamak dan loba dengan mengambil istri banyak dan memelihara gundik.

Kesimpulan

Dalam perkara kepemimpinan, Raja Ali Haji secara tidak langsung membahas tentang Kepemimpinan. Walaupun beberapa istilah pada masanya masih mengacu dan sesuai konteks zamannya. Secara gamblang Raja Ali Haji, sekaligus teolog-faqih, tidak saja menekankan perkara-perkara syarat menjadi raja, tetapi juga menekankan moral bagi calon raja, meski banyak raja atau sultan yang menjadi penguasa dinasti monarki atau pemerintahan militer tidak mematuhi syarat-syarat tersebut. Pengangkatan seseorang yang memenuhi syarat ini ditekankan pada kitab-kitab politik dan memiliki moral terpuji menjadi

¹⁵ Raja Ali Haji, *Tsamarat al-Muhimmah*, h. 78-107

prioritas, karena bagi Raja Ali Haji seseorang pemimpin tidak saja sebagai raja tetapi juga sebagai imam. Penekanan ini harus dikelola secara rasional. Syarat ini merupakan alat cegah agar kekuasaan Riau-Lingga tidak berorientasi pada raja, tetapi pada kekuasaan itu menekankan pada hak-hak publik, kemaslahatan umum, dan hak Tuhan. Dia menyebut syarat-syarat menjadi raja mirip dengan pendapat al-Ghazali, al-Mawardi – antara lain: (1) beragama Islam serta memegang teguh ajaran agama, (2) laki-laki yang merdeka, (3) adil, (4) memiliki kemampuan ijtihad yang elok, (5) kemampuan berbicara yang baik, (6) kemampuan mendengar yang baik, (7) kemampuan penglihatan yang baik, (8) rajin serta berani dan tidak malas dalam mendirikan kerajaan, dan (9) segera bangkit pada setiap pekerjaan yang mengarah pada kebajikan. Ketika raja sudah dilantik, semua rakyat harus taat padanya, mereka yang menolak untuk taat dihukum sebagai pemberontak (*bughat*) kepada pemerintahan yang sah.

Selain itu, Raja Ali Haji dalam *muqadimah* nya *Tsamarat al-Muhimmah*, secara gamblang menekankan keutamaan ilmu yang menurutnya ilmu itu sangat penting dalam berkepemimpinan serta dalam menjalani hidup. Selanjutnya Raja Ali Haji menyinggung faktor-faktor kepemimpinan, *Pertama*, ilmu dan akal merupakan faktor pembeda terpenting antara manusia dengan binatang. Lalu *Kedua*, orang bodoh akan cenderung gagal memahami pesan mendasar Islam dia tidak mengenal Allah ta'ala dan rasul-Nya *Ketiga*, orang jahil potensial melanggar doktrin-doktrin mengajarkan dasar agama. *Keempat*, orang yang bodoh juga berpotensi mengingkari doktrin-doktrin eskatologis dalam Islam seperti kiamat, kebangkitan dari kubur, padang mahsyar, pahala amal baik dan buruk di akhirat, serta mengingkari adanya surga dan neraka. Serta *Kelima*, orang Jahil akan celaka atau binasa karena tidak mengetahui hukum akal hukum adat dan hukum *syara*'.

Daftar Pustaka

- Ali Haji, Raja, *Tsamarat Al - Muhimmah*. Lingga: Office Government, 1886
- Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), edisi. I, cet ke- 1
- Aristoteles, *La Politiká*, terj. Benjamin Jowett, Kitchener: Batoche Books, 1999
- Effendi, Tenas, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu Riau*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. 2006
- Faisal, Muhammad, *Etika Melayu: Pemikiran Moral Raja Ali Haji*. Bintan: Stain Sultan Abdurrahaman Press, 2019
- Fata, Khairul Ahmad, “Kepemimpinan dalam Politik Islam”, *Jurnal Review*, Vol. 2 no.1. 2012
- Junus, Hasan, Raja Ali Haji: Budayawan di Gerbang Abad XX. Pekanbaru: Unri Press, 2002
- Pangestoety, W, *Kepemimpinan*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2016
- Runi, Ishak, *Buku Ajar; Teori Kepemimpinan* Polopo: Pusat Pengembangan Materi Ajar (PPMA), 2016
- Syahid, Achmad, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*. Jakarta: Puslitbang Lektor Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009